

**ANALISIS EVALUASI DAMPAK PEMEKARAN DAERAH
TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
(Studi Kasus pada Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara)**

Debby Fachrunnisa Sumardi

Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,
Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan,
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183.

Email : debbysumardi@gmail.com

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi dampak pemekaran daerah terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini mengambil studi kasus di Kabupaten Konawe Utara yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Konawe yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2008-2018 mengalami fluktuasi, dengan rata-rata 7,28%. Jika dikelompokkan kedalam Tipologi Klassen Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2008-2018 berada pada keadaan “Daerah Maju Tapi Tertekan”. Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2008-2018 memiliki rata-rata sebesar 67,21. Namun berdasarkan hasil analisis kemampuan fiskal di Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2008-2018 menunjukkan bahwa kemampuan fiskal di Kabupaten Konawe Utara masih *Sangat Rendah*.

Kata Kunci : Pemekaran Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Tipologi Klassen, IPM, Kemampuan Fiskal.

ABSTRACT

This study aims to analyze the evaluation of the impact of regional expansion on community welfare. This research takes a case study in North Konawe Regency which is a division of Konawe Regency which was formed based on Law No. 13 of 2007. This research is a descriptive study using secondary data from statistics Indonesia.

Based on the results of the analysis that has been done, it is obtained that the rate of economic growth in North Konawe Regency in 2008-2018 has fluctuated, with an average of 7.28%. If classified into Klassen Typology, North Konawe Regency in 2008-2018 is in the "Advanced but Depressed Region". The Human Development Index in North Konawe Regency in 2008-2018 has an average of 67.21. However, based on the results of the analysis of fiscal capability in North Konawe District in 2008-2018, it showed that the fiscal capability in North Konawe District is still Very Low.

Keywords: Regional Expansion, Economic Growth, Klassen Typology, HDI, Fiscal Capability.

PENDAHULUAN

Otonomi daerah di Indonesia tercetus pada tahun 1999 yang lahir ditengah gejolak sosial yang didahului oleh krisis ekonomi yang melanda Indonesia disekitar tahun 1997. Gejolak sosial ini kemudian berujung pada krisis politik yang puncaknya ditandai dengan jatuhnya rezim orde baru yang telah berkuasa selama 32 tahun di Indonesia. Setelah jatuhnya rezim orde baru, lahirlah permasalahan baru terkait dengan sistem ketatanegaraan dan tuntutan dari daerah-daerah yang selama ini merasa telah memberikan kontribusi besar dengan kekayaan alam yang dimilikinya tetapi tidak mendapatkan kompensasi sesuai dengan apa yang mereka keluarkan. Wacana otonomi daerah kemudian muncul sebagai suatu konsep alternatif untuk menyelesaikan permasalahan sosial dan ketatanegaraan Indonesia yang dianggap telah usang dan perlu diganti.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bab I, Pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah merupakan sistem pelimpahan

kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerintahan sendiri yang diharap mampu membangun negara secara lebih efektif dan efisien.

Widajaja (2002) menjelaskan bahwa pemerintah pusat dihimbau untuk tidak terlalu aktif mengatur daerah sehingga daerah lebih mandiri dalam menentukan segala kebijakan-kebijakan yang daerah yang akan laksanakan. Pemerintah daerah dengan adanya otonomi daerah diharapkan mendapatkan tujuan dari otonomi daerah itu sendiri yang dapat memajukan daerah dengan mengenali kemampuan, kekuatan, kapasitas sumber-sumber daya alamnya yang akan pemerintah daerah kelola secara maksimal. Dengan adanya otonomi daerah juga pemerintah daerah diharapkan mampu untuk memperkuat kinerja, dan dapat mempertanggung jawabkan kepada pemerintah pusat maupun kepada publik atau masyarakat.

Sejak otonomi daerah dan desentralisasi mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2001, pemekaran daerah kabupaten dan kota dan juga provinsi menjadi suatu fenomena, sejak saat itu jumlah daerah terus bertambah. Berdasarkan sumber dari Badan Pusat Statistik, Indonesia saat ini memiliki 34 provinsi dan 514 kota dan kabupaten yang tersebar dari sabang sampai merauke.

Ada berbagai alasan yang mendorong meningkatnya keinginan pemekaran wilayah. Hal tersebut dapat dipicu oleh faktor perbedaan agama, perbedaan etnis (budaya), ketimpangan (disparitas) pembangunan ekonomi antar wilayah dan luas wilayah. Secara formal, keinginan pemekaran wilayah dipicu dalam kerangka meningkatkan jangkauan pelayanan publik, terutama untuk daerah dengan luas cukup besar. Akan tetapi tidak dapat pula dipungkiri bahwa keinginan untuk melakukan pemekaran wilayah tersebut juga dipicu oleh aspek keuangan daerah dan politis. Salah satu tujuan dari pemekaran wilayah yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu wilayah yang berada di Indonesia yaitu Sulawesi Tenggara (Sultra) adalah provinsi dengan urutan ketiga pemegang daerah pemekaran terbanyak sejak tahun 2001 dengan 14 daerah pemekaran, setelah urutan pertama dipegang oleh Provinsi Papua dengan 19 daerah pemekaran, dan urutan kedua dengan jumlah yang sama oleh provinsi Sumatera Utara sebanyak 14 daerah

pemekaran. Dengan 14 daerah pemekaran, Sultra dalam hal ini, diharapkan menjadi salah satu daerah yang mandiri dengan potensi sumber daya alam yang melimpah sebagai komoditi unggulan diantaranya dibidang pertanian meliputi kakao, kacang mede, kelapa, cengkeh, kopi, pinang, merica dan vanili, dan dibidang pertambangan meliputi aspal, nikel, emas, marmer, dan sebagainya. Tak lupa juga potensi sejarah, kebudayaan, dan alam yang dimiliki, salah satunya adalah Taman Nasional Wakatobi yang memiliki 750 spesies terumbu karang dari 850 spesies terumbu karang dunia.

Konawe Utara adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007. Luas Wilayah Kabupaten Konawe Utara adalah 5.101,76 km² (Daratan) dengan jumlah penduduk 62.403 jiwa. Komoditi unggulan Kabupaten Konawe Utara yaitu sektor perkebunan, pertanian dan jasa. Perkebunan komoditi unggulannya adalah Kakao, Kopi, Kelapa, Cengkeh, Jambu Mete, Merica, dan Pala.

Penelitian yang dilakukan oleh Ferawati (2015) yang menganalisis perbandingan kinerja ekonomi di daerah induk dan daerah pemekaran di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Aceh mendapatkan hasil bahwa semua daerah induk memiliki angka kinerja ekonomi daerah yang lebih besar dibandingkan dengan daerah pemekarannya. Artinya bahwa kinerja ekonomi daerah induk masih lebih baik dibandingkan daerah pemekaran. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Sardi (2016) menunjukkan hasil bahwa pada tahun 2009-2013 Kabupaten Konawe Utara memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik namun kemampuan fiskal yang rendah.

Dari uraian yang telah dipaparkan diatas, maka dari itu penulis ingin melakukan penelitian dengan judul : “ANALISIS EVALUASI DAMPAK PEMEKARAN DAERAH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Kasus pada Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara)”.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Konawe Utara?
2. Bagaimana Analisis Tipologi Klassen di Kabupaten Konawe Utara?
3. Bagaimana Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Konawe Utara?
4. Bagaimana Kinerja Kemampuan Fiskal di Kabupaten Konawe Utara?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai dampak pemekaran daerah di Kab. Konawe Utara, sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Konawe Utara.
2. Mengetahui bagaimana Analisis Tipologi Klassen di Kabupaten Konawe Utara.
3. Mengetahui bagaimana Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Konawe Utara.
4. Mengetahui bagaimana Kinerja Kemampuan Fiskal di Kabupaten Konawe Utara.

METODE PENELITIAN

Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh orang-orang atau lembaga untuk tujuan-tujuan lain daripada tujuan lain yang sedang diteliti oleh peneliti. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari BPS.

Metode Analisis

Model analisis dalam penelitian ini adalah Model Deskriptif dengan penelitian Kuantitatif dan Kualitatif yaitu dengan analisa data sekunder. Penelitian ini menggunakan metode analisa secara deskriptif yang berisi pemaparan yang di dapat dari hasil analisa terhadap data sekunder.

1. Pertumbuhan Ekonomi

Untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi per tahun dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$g_t = \frac{(PDRB_t - PDRB_{t-1})}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

G_t = Laju pertumbuhan ekonomi (rate of growth)

t = Tahun tertentu

$t-1$ = Tahun sebelumnya

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto

Pertumbuhan ekonomi rata-rata dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut

$$\bar{g} = \frac{g_1 + g_2 + g_3 \dots \dots \dots g_n}{n}$$

dimana:

\bar{g} adalah laju pertumbuhan ekonomi pertumbuhan rata-rata

1,2,3n adalah tahun pengamatan

2. Tipologi Klassen

Tipologi Klassen digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Pertumbuhan PDRB yang dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB pusat dan pendapatan perkapita daerah yang dibandingkan dengan pendapatan perkapita pusat adalah dua indikator utama yang digunakan dalam analisis tipologi klassen.

Terdapat empat klasifikasi yang dibagi dalam analisis tipologi klassen yaitu

daerah cepat maju dan cepat tumbuh (High growth and high income), daerah maju tapi tertekan (high income but low growth), daerah berkembang cepat (high growth but low income) dan daerah relatif tertinggal (low growth and low income). Kriteria yang digunakan untuk membagi daerah adalah sebagai berikut:

1. Daerah cepat maju dan cepat tumbuh (High growth and high income) yaitu daerah yang memiliki laju pertumbuhan PDRB dan pendapatan perkapita lebih tinggi dari laju pertumbuhan PDRB pusat dan pendapatan perkapita pusat.
2. Daerah maju tapi tertekan (high income but low growth) yaitu daerah yang memiliki laju pertumbuhan PDRB lebih rendah daripada laju pertumbuhan PDRB pusat, namun memiliki pendapatan perkapita lebih tinggi daripada pendapatan perkapita pusat.
3. Daerah berkembang cepat (high growth but low income) yaitu daerah yang memiliki laju pertumbuhan PDRB lebih tinggi daripada laju pertumbuhan PDRB pusat, tetapi memiliki pendapatan perkapita lebih rendah daripada pendapatan perkapita pusat.
4. Daerah relatif tertinggal (low growth and low income) yaitu daerah yang memiliki laju pertumbuhan PDRB dan pendapatan perkapita lebih rendah dari laju pertumbuhan PDRB pusat dan pendapatan perkapita pusat.

3. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, Pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara. IPM digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan dan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara termasuk negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Interpretasi nilai IPM semakin tinggi nilai IPM suatu daerah, dalam arti semakin mendekati nilai 100, maka semakin bagus tingkat pembangunan manusia di daerah tersebut sesuai dengan kriteria nilai suatu daerah.

TABEL 1
Skala Interval Indeks Pembangunan Manusia

Nilai	Keterangan
IPM < 50	Rendah
50 < IPM < 80	Sedang
IPM > 80	Tinggi

Sumber : BPS 2018

4. Analisis Kinerja Kemampuan Fiskal

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan maka teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun tolak ukur yang akan digunakan dalam teknik analisis ini adalah :

a. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat Desentralisasi Fiskal adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan. Derajat Desentralisasi Fiskal, khususnya komponen PAD dibandingkan dengan TPD menggunakan skala interval sebagaimana terlihat dalam sebagai berikut :

TABEL 2
Skala Interval Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
00,00-10,00	Sangat Rendah
10,01-20,00	Rendah
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Tinggi
>40,01	Sangat Tinggi

Sumber : Wulandari (2001)

Derajat desentralisasi Fiskal dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut :

$$DDF = \frac{PADt}{TPDt} \times 100\%$$

Keterangan :

DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal

PADt = Total Pendapatan Asli Daerah tahun t

TPDt = Total Pendapatan Daerah tahun t

b. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Formula rasio kemandirian adalah sebagai berikut

$$RKKD = \frac{PAD}{Pendapatan Transfer} \times 100\%$$

TABEL 3

Pola Hubungan dan Skala Interval Rasio Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Tingkat Kemandirian (%)	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Pola Hubungan
0% - 25 %	Sangat Rendah	Instruktif
25% - 50 %	Rendah	Konsultatif
50% - 75%	Sedang	Partisipatif
75% - 100%	Tinggi	Delegatif

Sumber : Halim (2007)

Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian Keuangan Daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen

utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi.

c. Rasio Keserasian Belanja Daerah

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi berarti persentase belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Secara sederhana, rasio keserasian itu dapat diformulasikan sebagai berikut (Halim 2007) :

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Dengan kriteria sebagai berikut :

TABEL 4

Skala Interval Keserasian Belanja Keuangan Daerah

Keserasian Belanja Keuangan Daerah	Rasio (%)
Sangat Rendah	0-20
Rendah	20-40
Sedang	40-60
Tinggi	60-80
Sangat Tinggi	80-100

Sumber : Batafor (2011)

d. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintahan daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintahan semakin baik.

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah :

$$REKD = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

TABEL 5
Skala Interval Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Kriteria efisiensi	Persentase Efisiensi
100% keatas	Tidak Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
60%-80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber : Halim (2007)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Pertumbuhan Ekonomi

PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam satu periode tertentu. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam satu daerah tertentu. Semakin besar angka yang dihasilkan pada PDRB menunjukkan semakin bagus ekonomi suatu daerah.

TABEL 6
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 dan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Konawe Utara Tahun 2008-2018

Tahun	PDRB (Jutaan Rupiah)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2008	1.329.115,91	-
2009	1.488.466,50	11,99%
2010	1.610.763,93	8,22%
2011	1.756.433,05	9,04%
2012	1.907.058,06	8,58%
2013	2.040.835,62	7,01%
2014	2.105.152,61	3,15%
2015	2.247.306,50	6,75%
2016	2.374.008,65	5,64%
2017	2.516.512,05	6,00%
2018	2.677.037,32	6,38%

Sumber : Data Olah

Pada Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Konawe Utara mengalami fluktuasi. Pada tahun 2009 tingkat

pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Konawe Utara sebesar 11,99% lalu turun pada tahun 2010 sebesar 8,22%. Pada tahun 2012 terjadi kenaikan menjadi sebesar 8,58% lalu terus menurun pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2013 menjadi 7,01% dan 2014 menjadi 3,15%. Pada tahun 2015 terjadi kenaikan lagi menjadi sebesar 6,75% lalu disusul penurunan pada tahun selanjutnya menjadi 5,64%. Pada tahun 2017, Kabupaten Konawe Utara mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 6,00% dan mengalami peningkatan pada tahun berikutnya sebesar 6,38%.

Penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 disebabkan karena tingkat perubahan nilai sektor-sektor yang mengalami kenaikan tetapi tidak besar, bahkan jika dilihat terjadi penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat besar dari 7,01% pada tahun 2013 menjadi 3,15% pada tahun 2014. Penurunan ini didasari dengan penurunan dari sektor Pertambangan dan Penggalian pada tahun 2013 sebesar Rp.519.682.280.000,- mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp.432.600.270.000,-. Ini berarti terjadi penurunan di sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 16,76%. Hal inilah yang menjelaskan mengapa terjadi penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat besar pada tahun 2014.

2. Analisis Tipologi Klassen

Tipologi Klassen digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Pertumbuhan PDRB yang dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB pusat dan pendapatan perkapita daerah yang dibandingkan dengan pendapatan perkapita pusat adalah dua indikator utama yang digunakan dalam analisis tipologi kelas.

Terdapat empat klasifikasi yang dibagi dalam analisis tipologi kelas yaitu daerah cepat maju dan cepat tumbuh (High growth and high income), daerah maju tapi tertekan (high income but low growth), daerah berkembang cepat (high growth but low income) dan daerah relatif tertinggal (low growth and low income).

TABEL 7
Analisis Tipologi Klassen Kabupaten Konawe Utara Tahun 2008-2018

Tahun	PDRB Per Kapita Kab. Konawe Utara (Rupiah)	PDRB Per Kapita Prov. Sulawesi Tenggara (Rupiah)	Pertumbuhan Ekonomi Kab. Konawe Utara (%)	Pertumbuhan Ekonomi Prov. Sulawesi Tenggara (%)	Tipologi Klassen
2008	29.045.365	20.544.523	-	-	-
2009	31.917.368	21.226.475	11,99	7,57	Daerah Maju
2010	31.082.027	21.573.111	8,22	8,19	Daerah Maju
2011	33.085.935	23.338.073	9,04	10,63	Daerah Maju Tapi Tertekan
2012	35.079.428	25.489.785	8,58	11,65	Daerah Maju Tapi Tertekan
2013	36.558.391	26.817.472	7,01	7,51	Daerah Maju Tapi Tertekan
2016	39.783.631	30.476.389	5,64	6,51	Daerah Maju Tapi Tertekan
2017	41.332.896	31.894.472	6,00	6,76	Daerah Maju Tapi Tertekan
2018	42.899.176	33.285.619	6,38	6,42	Daerah Maju Tapi Tertekan

Sumber : Data Olah

Pada hasil analisis tabel diatas, Kabupaten Konawe Utara pada tahun awal pemekaran terindifikasi sebagai Daerah Maju karena PDRB Per Kapita dan Laju Pertumbuhannya lebih besar daripada PDRB Prov. Sulawesi Tenggara. Sedangkan mulai tahun 2011 sampai 2018, Kabupaten Konawe Utara terindifikasi sebagai Daerah Maju tapi Tertekan karena PDRB Per Kapita Kab. Konawe Utara lebih besar daripada PDRB Per Kapita Prov. Sulawesi Tenggara, namun tingkat pertumbuhan Kabupaten Konawe Utara lebih rendah daripada tingkat pertumbuhan ekonomi Prov. Sulawesi Tenggara. Daerah Maju tapi Tertekan adalah daerah-daerah yang relatif maju tetapi dalam beberapa tahun terakhir laju pertumbuhannya menurun akibat tertekannya kegiatan utama daerah yang bersangkutan. Karena itu, walaupun daerah ini merupakan daerah telah maju tetapi di masa datag diperkirakan pertumbuhannya tidak akan begitu cepat, walaupun potensi pembangunan yang dimiliki pada dasarnya sangat besar.

3. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, Pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara. IPM digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan dan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara termasuk negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Interpretasi nilai IPM semakin tinggi nilai IPM suatu daerah, dalam arti semakin mendekati nilai 100, maka semakin bagus tingkat pembangunan manusia di daerah tersebut sesuai dengan kriteria nilai suatu daerah.

TABEL 8
Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2008-2018

Tahun	IPM
2008	67,43
2009	67,97
2010	68,38
2011	69,24
2012	64,87
2013	65,54
2014	66,03
2015	66,44
2016	67,20
2017	67,71
2018	68,50

Sumber : BPS (2019)

Pada tabel diatas menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2008 sampai 2018. Angka IPM Kabupaten Konawe Utara berada di interval IPM Sedang. Artinya penduduk Kabupaten Konawe Utara dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, Pendidikan, dan sebagainya dengan cukup baik. Angka Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Konawe Utara selalu berada diatas angka indeks 60. IPM tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu 69,24 dan IPM terendah terjadi pada tahun 2014 yaitu 66,03.

4. Kinerja Kemampuan Fiskal

a. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat Desentralisasi Fiskal adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan.

TABEL 9
Penghitungan Rasio DDF Kabupaten Konawe Utara
Tahun Anggaran 2008-2018

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah (Juta Rp.)	Total Pendapatan Daerah (Juta Rp.)	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (%)	Keterangan
2008	25.553	217.609	11,47%	Rendah
2009	17.722	396.344	4,47%	Sangat Rendah
2010	14.698	438.189	3,35%	Sangat Rendah
2011	88.043	545.755	16,13%	Rendah
2012	88.043	545.755	16,13%	Rendah
2013	23.119	581.828	3,97%	Sangat Rendah
2014	10.539	591.597	1,78%	Sangat Rendah
2015	8.993	677.955	1,33%	Sangat Rendah
2016	10.048	783.005	1,28%	Sangat Rendah
2017	21.690	742.535	2,92%	Sangat Rendah
2018	15.614	778.087	2,01%	Sangat Rendah

Sumber : Data Olah

Berdasarkan hasil perhitungan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Kinerja Keuangan Kabupaten Konawe Utara jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dikategorikan Sangat Rendah. Terlihat sepanjang 10 Tahun berjalan hanya 3 tahun berada diangka persentase lebih dari 10%. Dimulai dari Tahun 2008 sebesar 11.47% terus mengalami penurunan pada tahun selanjutnya yaitu pada 2009 sebesar 4.47% dan tahun 2010 sebesar 3.35%, sedangkan untuk tahun 2011 dan 2012 mengalami peningkatan menjadi 16.13%. Setelah itu terus terjadi penurunan pada tahun 2013 sampai 2016. Namun pada tahun 2017 terjadi kenaikan sebesar 2.92% dan menurun lagi pada tahun 2018 sebesar 2.01%. Berdasarkan hasil diatas, setelah sempat berada diatas 10% pada tahun 2011 dan 2012, namun secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kemampuan kinerja

keuangan Kabupaten Konawe Utara jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal masih Sangat Rendah, karena berada pada skala Interval 0,00%-10,00%.

b. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Hasil dari perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

TABEL 10
Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara
Tahun Anggaran 2008-2018

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah (Jutaan Rp)	Dana Perimbangan (Jutaan Rp)	RKKD (%)	Keterangan Tingkat Kemandirian	Pola Hubungan
2008	25.553	176.664	14,46%	Sangat Rendah	Instruktif
2009	17.722	349.054	5,08%	Sangat Rendah	Instruktif
2010	14.698	389.035	3,78%	Sangat Rendah	Instruktif
2011	88.043	369.135	23,85%	Sangat Rendah	Instruktif
2012	88.043	369.135	23,85%	Sangat Rendah	Instruktif
2013	23.119	525.239	4,40%	Sangat Rendah	Instruktif
2014	10.539	549.239	1,92%	Sangat Rendah	Instruktif
2015	8.993	596.359	1,51%	Sangat Rendah	Instruktif
2016	10.048	674.238	1,49%	Sangat Rendah	Instruktif
2017	21.690	587.140	3,69%	Sangat Rendah	Instruktif
2018	15.614	749.176	2,08%	Sangat Rendah	Instruktif

Sumber : Data Olah

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas kemampuan keuangan Kabupaten Konawe Utara jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tergolong masih sangat rendah dan pola hubungannya termasuk pola hubungan instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah. Nilai terendah terjadi pada tahun 2016 dimana nilainya sebesar 1,46% dan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2011 dan 2012 yaitu sebesar

23.85%. Pada tahun awal yaitu tahun 2008 sebesar 14,46% sedangkan selebihnya masih dibawah 10%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pihak ekstern (terutama bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi) masih sangat tinggi.

c. Rasio Keserasian Belanja Daerah

Rasio Keserasian Belanja Daerah menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja modal secara optimal. Hasil dari perhitungan Rasio Keserasian Belanja Daerah dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

TABEL 11
Penghitungan Rasio Keserasian Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara
Tahun Anggaran 2008-2018 (Belanja Modal)

Tahun	Total Belanja (Jutaan Rupiah)	Realisasi Belanja Modal (Jutaan Rupiah)	Rasio Belanja Operasi (%)	Keterangan
2008	252.484	77.332	30,63	Rendah
2009	399.958	153.619	38,41	Rendah
2010	440.245	189.539	43,05	Sedang
2011	517.601	224.172	43,31	Sedang
2012	517.601	224.172	43,31	Sedang
2013	539.656	200.742	37,20	Rendah
2014	599.935	215.901	35,99	Rendah
2015	690.419	264.843	38,36	Rendah
2016	750.434	225.164	30,00	Rendah
2017	737.952	164.326	22,27	Rendah
2018	613.024	146.887	23,96	Rendah

Sumber : Data Olah

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kecenderungan untuk alokasi penggunaan dana pada Belanja Modal masih dibawah 50%. Nilai tertinggi terdapat pada tahun 2010-2012 yaitu diatas 40% dalam kategori Sedang. Selebihnya pada tahun 2008-2009, dan tahun 2013 -2018 nilainya masih rendah.

d. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Hasil dari perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL 12
Penghitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah
Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2008-2018

Tahun Anggaran	Realisasi Belanja (Jutaan Rp)	Realisasi Pendapatan (Jutaan Rp)	REKD (%)	Keterangan
2008	252.484	217.609	116,03	Tidak Efisien
2009	399.958	396.344	100,91	Tidak Efisien
2010	440.245	438.189	100,47	Tidak Efisien
2011	517.601	545.755	94,84	Kurang Efisien
2012	517.601	545.755	94,84	Kurang Efisien
2013	539.656	581.828	92,75	Kurang Efisien
2014	599.935	591.597	101,41	Tidak Efisien
2015	690.419	677.955	101,84	Tidak Efisien
2016	750.434	783.005	95,84	Kurang Efisien
2017	737.952	742.535	99,38	Kurang Efisien
2018	613.024	778.087	78,79	Efisien

Sumber : Data Olah

Berdasarkan penghitungan pada tabel diatas Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara Kurang Efisien. Hal ini didasarkan pada data yang menunjukkan selama 10 tahun berjalan. Pada tahun 2018 terakhir Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara berada pada angka 78,79% dalam artian efisien yaitu Realisasi pendapatan lebih besar daripada Relalisasi Belanja. Dimulai pada tahun 2008 sampe 2017 angka rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara selalu mencapai angka diatas 90% yang artinya Kurang Efisien, bahkan pada tahun 2008-2010, dan 2014-2015 menjadi tidak efisien karena melebihi angka 100% yang berarti Realisasi Belanja Lebih Besar daripada Realisasi Pendapatan yang terjadi.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2008-2018 mengalami fluktuasi. Tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Kabupaten Konawe Utara terjadi pada tahun awal pemekaran yaitu 2009 sebesar 11,99%. Tingkat pertumbuhan ekonomi terendah di Kabupaten Konawe Utara terjadi pada tahun 2014 sebesar 3,15%. Rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2008-2018 yaitu 7,28%.
2. Jika dikelompokkan kedalam Tipologi Klassen yang didasarkan pada tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita, Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2008-2018 berada pada keadaan “Daerah Maju Tapi Tertekan”.
3. Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Konawe Utara secara rata-rata pada tahun 2008-2018 sebesar 67,21.
4. Berdasarkan hasil analisis kemampuan fiskal di Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2008-2018 menunjukkan bahwa kemampuan fiskal di Kabupaten Konawe Utara masih *Sangat Rendah*, hal ini didasarkan pada rata-rata dari empat indikator kinerja keuangan yaitu : Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal *Sangat Rendah*, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah *Sangat Rendah*, Rasio Keserasian Belanja Daerah *Rendah*, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah *Kurang Efisien*.

Saran

Dari kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pemekaran daerah harus disikapi dengan sangat hati-hati. Pertama-tama diperlukan persiapan yang memadai bagi calon daerah otonom baru dengan

melihat kondisi nyata di lapangan. Pengambilan keputusan kebijakan harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar berdampak positif bagi kesejahteraan rakyat.

2. Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebaiknya sebelum memutuskan untuk melakukan pemekaran daerah terlebih dahulu melakukan evaluasi kelayakan terhadap daerah yang akan dilakukan pemekaran agar daerah baru yang terbentuk benar-benar memiliki kesiapan sebagai sebuah daerah otonomi yang memiliki kinerja ekonomi daerah yang baik.
3. Diperlukan kajian lebih lanjut tentang dampak pemekaran daerah yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara khususnya di Kabupaten Konawe Utara karena penelitian ini hanya terbatas pada Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Analisis Kemampuan Fiskal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M.A. 2011. “Kajian Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pembangunan Daerah (Studi Kasus: Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat)”. Tesis. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Abe, A. 2002. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Solo : Pondok Edukasi.
- Agusniar, A. 2006. “Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Perekonomian Wilayah dan Kesejahteraan Masyarakat”. Skripsi. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Agustin, Fitriyah. 2007. “Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar)”. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang.
- Aminah, *et al.* 2019. “Regional Expansion and the Local Community Welfare: A Study of the Effectiveness of 20 Years of Implementation of Autonomy in Indonesia” *Reviews of Integrative Business and Economics Research Vol 8*.
- Andhiantoko, Hony. 2013. “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora (Studi Kasus pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten Blora tahun 2007-2011)”. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapennas) dan United Nations Development Programme (UNDP). 2008. *Studi Evaluasi Dampak Pemekaraan Daerah 2001-2007*. BRIDGE.
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Kabupaten Konawe Utara Dalam Angka 2009-2019*. Konawe Utara : BPS Kabupaten Konawe Utara
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2009-2019*. Kendari : BPS Provinsi Sulawesi Tenggara
- Barata, A.A. dan Trihartanto, Bambang. 2004. *Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Batafor, Gregorius Gehi. 2011. "Evaluasi Kinerja dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lambata, Propinsi NTT". Tesis. Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar.
- Bratakusumah, D.S dan Riyadi. 2003. *Perencanaan Pembangunan Daerah-Strategi Menggali Potensi dalam mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Cheema, G. Shabbir dan Rondinelli, Dennis A. 1983. *Decentralization and Development : Policy Implementation in Developing Countries*, London: Sage Publications.
- Dora, Juliani. 2017. "Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014". Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
- Endaryanto, Teguh. *et al.* 2015. "The Impact of Regional Expansion on Economic Structure: A Case Study in Lampung Province, Indonesia". *International journal of sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR) Vol. 23*
- Ferawati. 2015. "Analisis Perbandingan Kinerja Ekonomi Daerah Pemekaran Dengan Daerah Induk di Aceh". Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala : Darussalam Banda Aceh
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Hermawati, Ricca. "Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Wilayah". Skripsi. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Juanda, B. 2007. "Pemekaran Daerah Serta Implikasinya Terhadap APBN" *Jurnal Ekonomi, Volume XXV, Edisi Oktober 2007: 157-171*.

- Mahmudi. 2013. *Akuntansi Sektor Publik, Cetakan Kedua*, Yogyakarta : UII Press
- Mutiha, Arthaingan H. 2016. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010-2014" *Jurnal Vokasi Indonesia Volume 4, Nomor 2. Juli-Desember 2016*.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah
- Rondinelli, Dennis A. etc, 1981. *Decentralization in Developing Countries : A Review of Recent Experience*, World Bank Staff Working Papers. Washington DC
- Rusli, S. 2010. *Pengantar Ilmu Kependudukan*. Bogor : In Press.
- Sardi. Balaka, Muh. Yani. dan Saranani, Fajar. 2016. "Kemampuan Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Konawe Utara". *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan Volume 1, Nomor 1*.
- Satria, Indah. 2013. "Analysis of Regional Expansion as Implications of Regional Autonomy Implementation". *The First International Conference on Law, Business and Government 2013*.
- Sumual, Christian D. Kalangi, Lintje. dan Gerunggai, Natalia. 2017. "Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Tomohon." *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(2). 2017. Halaman 782-791*.
- Suraji. Bakri, Putra Ahmad. Ali, Embi Muhammad. 2018. "The Development of Regional Expansion Apparatus Resource Placement in Indonesia" *Russian Journal of Agriculture and Socio-Economic Sciences 2*.
- Thoha, Miftah. 1991. *Beberapa Aspek Kebijakan Birokrasi*. Jogjakarta : Widya Mandala
- Todaro, M.P dan Smith, S.C. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Kedelapan Jilid 1*. Jakarta : Erlangga
- Wahyuni, Sri. 2008. "Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemeritah Kabupaten Sragen Dalam Mndukung Pelaksanaan Otonomi Daerah." Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Widada, Sri .2012. "Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten." Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta

- Widjaja, H.A.W. 2002. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonomi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Wulandari, Anita. 2001. “Kemampuan Keuangan Daerah di Kota Jambi Dalam Melaksanakan Otonomi Daerah”. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Kemampuan Keuangan Daerah (Vol. 5, No. 2). November*.
- Yulianita, Anna. 2013. “Analisis Kinerja Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Muara Enim (Kota Induk) dengan Kota Prabumulih (Kota Baru)” *Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 11 No. 1 Hal 34-53*.
- Zuhri, Muhammad. dan Soleh, Ahmad. 2015. “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur”. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu. Bengkulu.